



---

## PERSEPSI MASYARAKAT WANASARI AGRABINTA TERHADAP FUNGSI BPD : PERAN KAPASITAS INDIVIDU DAN KOMUNIKASI ORGANISASI

Neli Yuliawati<sup>1</sup>, Rachmat Rachmat <sup>2</sup>, Yeni Sopiatur Nursapitri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Pemerintahan, STISIP Guna Nusantara Cianjur

\*Corresponding author: [neliyuliawati85@gmail.com](mailto:neliyuliawati85@gmail.com)

---

### ABSTRAK

#### Informasi Artikel:

Terima: 11-03-2026

Revisi: 10-03-3206

Disetujui: 05-04-2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas individu dan komunikasi organisasi terhadap persepsi masyarakat atas kinerja kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain explanatory research. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman berinteraksi dengan pemerintah desa. Analisis data menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas individu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat dengan nilai pengaruh sebesar 0,586. Sementara itu, komunikasi organisasi juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai pengaruh sebesar 0,388. Secara simultan, kedua variabel mampu menjelaskan variasi persepsi masyarakat sebesar 0,901, yang menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang sangat kuat. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dan efektivitas komunikasi organisasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas individu melalui pelatihan serta memperkuat sistem komunikasi yang transparan dan partisipatif guna mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

**Kata kunci:** Kapasitas Individu, Komunikasi Organisasi, Persepsi Masyarakat, Kinerja Kelembagaan, BPD

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of individual capacity and organizational communication on community perceptions of the institutional performance of the Village Consultative Body (BPD) in Wanasari Village, Agrabinta District, Cianjur Regency. The study employs a quantitative approach with an explanatory research design. Data were collected through questionnaires distributed to community members who have interacted with village government services. The analysis was conducted using Structural Equation Modeling based on Partial Least Squares. The results indicate that individual capacity has a positive and significant effect on community perception, with a coefficient value of 0.586. Meanwhile, organizational*

*communication also shows a positive and significant effect, with a coefficient value of 0.388. Simultaneously, both variables explain 0.901 of the variance in community perception, indicating that the research model has a very strong explanatory power. These findings highlight that the quality of human resources and the effectiveness of organizational communication are key determinants in enhancing public trust and evaluation of BPD performance. Therefore, strategic efforts are required to strengthen individual capacity through continuous training and to improve transparent and participatory communication systems in order to support better village governance.*

**Keywords:** *Individual Capacity, Organizational Communication, Community Perception, Institutional Performance, BPD*

## PENDAHULUAN

Pemberlakuan Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh bagi desa untuk mengatur seluruh kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi pilar utama demokratisasi akar rumput dan perwujudan tata kelola good governance. Desentralisasi ini memungkinkan desa mengelola pemerintahannya secara mandiri dan partisipatif (Widiarto et al.,2025;Setiadi et al.,2025). Keterlibatan BPD sangat esensial dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif di desa (Madjid, 2024). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengemban fungsi konstitusional krusial yang meliputi legislasi, penyaluran aspirasi, dan pengawasan kebijakan Pemerintah Desa. Efektivitas peran ini penting untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan (checks and balances) antara aparatur desa dan representasi warga. Sejalan prinsip desentralisasi, BPD mendorong partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tata kelola partisipatif dengan fungsi kontrol yang saling mengimbangi ini terbukti efektif mendukung demokratisasi pemerintahan lokal (Nair & Abhirami, 2024).

Keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat ditentukan oleh kapasitas individu dan komunikasi organisasi. Kapasitas individu, meliputi pendidikan dan kemampuan analitis, krusial untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna (Wahyuli et al.,2024). Sementara itu, komunikasi organisasi yang efektif memfasilitasi sinergi internal maupun eksternal lembaga. Kedua faktor penggerak ini berimplikasi langsung pada persepsi masyarakat sebagai penilai utama. Penguatan kedua aspek tersebut diyakini mampu meningkatkan efektivitas kelembagaan dan legitimasi kinerja BPD di mata warga (Sari et al., 2022).

Namun pada kenyataannya, seringkali terjadi disparitas yang nyata antara regulasi dan implementasi. Fenomena ini tergambar jelas di Desa Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Terletak di wilayah yang secara geografis sangat jauh dari ibu kota kabupaten, kondisi ini menuntut Kepala Desa beserta aparatur dan BPD untuk memiliki inisiatif ekstra guna mengakselerasi dinamisasi pembangunan secara mandiri. Akan tetapi, permasalahan serius mengemuka di lapangan. Tingkat kemampuan sumber daya dan pemahaman anggota BPD masih dirasa terbatas, ditambah dengan kurangnya sarana operasional. Hal ini berdampak langsung pada biasanya persepsi di kalangan warga. Masyarakat memiliki pandangan yang

sempit dan keliru bahwa BPD semata-mata hanya bertugas mengawasi Kepala Desa. Padahal, fungsi esensial lainnya seperti penyerapan aspirasi dan penyusunan Peraturan Desa justru sangat minim dijalankan. Lebih jauh, struktur keanggotaan BPD saat ini dinilai belum mewakili seluruh elemen masyarakat secara komprehensif, sehingga implementasi berbagai program desa berpotensi kehilangan arah partisipatif dan rawan terjadi penyelewengan karena lemahnya instrumen pengawasan yang berbasis perwakilan rakyat sesungguhnya.

Kajian pemerintahan desa selama ini terjebak pada analisis administratif dan dinamika politik elit (Kepala Desa vs BPD). Terdapat empat kesenjangan penelitian (research gap). utama: (1) kurangnya integrasi aspek sosial-ekonomi dan pemberdayaan masyarakat (Jamal et al., 2023); (2) minimnya tinjauan atas partisipasi warga secara kolektif yang dapat menekan dominasi elit ((Li et al., 2023); (3) terabaikannya inovasi tata kelola berbasis kultural secara bottom-up (Vorbach & Ensor, 2022); dan (4) minimnya studi mengenai dampak kolusi elit terhadap pembangunan desa (Ruan & Wang, 2022). Kebaharuan (novelty) penelitian ini menonjol melalui pergeseran paradigma evaluasi yang secara langsung memposisikan "Persepsi Masyarakat" sebagai lensa ukur validasi utama. Masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan yang pasif, melainkan sebagai penilai aktif yang merasakan secara langsung bagaimana Kapasitas Individu dan Komunikasi Organisasi BPD berdampak pada perwujudan kesejahteraan desa, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis yang spesifik.

Beranjak dari fenomena empiris tersebut, urgensi penelitian ini menjadi sangat vital. Jika kelemahan internal organisasi BPD dan kekeliruan pemahaman publik ini tidak segera diidentifikasi dan dievaluasi, maka peran partisipatif kemasyarakatan akan mati, kepentingan kelompok tertentu akan mudah mendominasi, dan tujuan sejati dari otonomi desa tidak akan pernah terwujud. Berdasarkan alur pemikiran strategis di atas, penelitian ini bermaksud mengkaji secara komprehensif mengenai persepsi masyarakat wanasari agrabinta terhadap fungsi BPD dengan peran kapasitas individu dan komunikasi organisasi.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa yang memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan lokal. Secara konstitusional, BPD mengemban tiga fungsi esensial: (1) Legislasi, yakni merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa sebagai wujud kebijakan lokal yang demokratis; (2) Penyaluran Aspirasi, bertindak sebagai representasi masyarakat untuk menjembatani dan mengakomodasi kebutuhan warga; serta (3) Pengawasan, melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan anggaran desa. Ketiga fungsi ini secara sinergis membentuk mekanisme checks and balances yang krusial untuk mencegah dominasi kekuasaan eksekutif desa. Mekanisme ini memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpusat pada partisipasi warga, sehingga tujuan tata kelola desa yang demokratis dapat tercapai (Amin & Roza, 2019).

---

### **Kapasitas Individu**

Dalam konteks organisasi publik dan pemerintahan, Kapasitas Individu merujuk pada akumulasi kemampuan, keterampilan, pemahaman, dan potensi kognitif yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) aparat atau aparatur untuk melaksanakan mandat, tugas, dan fungsi organisasinya secara efektif dan efisien (Debala et al.,2023). Kapasitas individu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat krusial untuk mengoptimalkan peran representatif mereka di tingkat lokal. Kapasitas ini menuntut penguasaan regulasi, kompetensi sosial, keterampilan komunikasi, dan kemampuan evaluasi kebijakan guna menjembatani aspirasi masyarakat secara konstruktif (Syam, et al.,2024). Dengan demikian, Kapasitas Individu didefinisikan sebagai: "daya dukung personal anggota BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, penyaluran aspirasi, dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan, yang mencakup penguasaan regulasi, keterampilan komunikasi, serta kemampuan pengawasan yang efektif" (Firdaus et al., 2024; Maricut-Akbik, 2021). Dalam penelitian ini indikator kapasitas individu secara empiris di lapangan, digunakan tiga indikator utama sebagai berikut (Briceno-Rosas, 2025) : (1) tingkat pendidikan dan pengetahuan; (2) pengalaman organisasi kemasyarakatan; (3) kemampuan analitis teknis (kecakapan merumuskan dan menelaah kebijakan).

### **Komunikasi Organisasi**

Komunikasi organisasi bukan sekadar pertukaran pesan, melainkan sistem strategis yang mengatur arus instruksi, koordinasi, dan aspirasi. Dalam konteks akademik, komunikasi idealnya bersifat simetris dan interaktif (Sueldo, 2024). Pada sektor pemerintahan, komunikasi berperan esensial dalam penyebaran kebijakan, manajemen krisis, dan penerapan kepemimpinan etis yang berdampak pada kinerja publik (Svenbro & Wester, 2022). Lebih lanjut, komunikasi efektif mendukung pengembangan sumber daya manusia. Transformasi digital turut mengakselerasi transparansi informasi, yang pelaksanaannya menuntut kepemimpinan adaptif serta infrastruktur siber yang tangguh guna kelancaran tata kelola (Gaie et al., 2025).

Dalam penelitian ini pengukuran komunikasi organisasi secara empiris dengan menggunakan indikator meliputi (Cidade & Oliveira, 2023): (1) Komunikasi Internal; (2) Komunikasi Eksternal/Sinergi; (3) Iklim Komunikasi (Keterbukaan dan Resolusi Konflik)

### **Persepsi Masyarakat atas Kinerja Kelembagaan**

Secara teoretis, persepsi adalah proses kognitif yang dilalui individu dalam menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus atau informasi untuk memberikan makna pada lingkungannya (Ma et al.,2024). Dalam konteks penelitian ini, Persepsi Masyarakat atas Kinerja Kelembagaan didefinisikan sebagai pandangan, penilaian, dan pemaknaan warga Desa Wanasari terhadap kualitas, efektivitas, dan kehadiran nyata Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tiga fungsi konstitusionalnya: legislasi, penyerapan aspirasi, dan pengawasan (Firdaus et al., 2024). Adapun indikator persepsi masyarakat atas kinerja kelembagaan dalam penelitian ini meliputi (Razak et al.,2024): (1) akuntabilitas, terkait dengan kewajiban lembaga

untuk bertanggung jawab; (2) transparansi, mengenai keterbukaan informasi dan pengambilan keputusan; (3) kualitas layanan, yang dilihat dari tingkat kepuasan pengguna layanan public; (4) partisipasi masyarakat, sebagai bentuk keterlibatan aktif dalam pemerintahan; (5) kepercayaan publik, sebagai hasil penilaian menyeluruh atas kinerja; (6) efisiensi pengelolaan sumber daya dan teknologi, sebagai indikator tata kelola modern yang efektif; (7) responsivitas lembaga, mengenai adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Kapasitas Individu terhadap Persepsi Masyarakat atas Kinerja Kelembagaan**

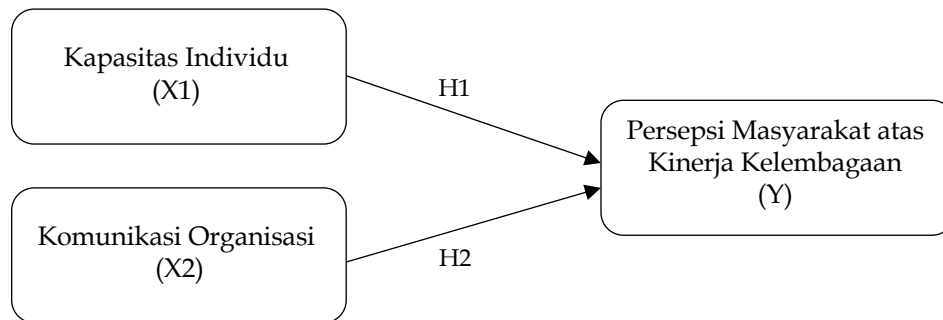
Kapasitas individu merupakan fondasi BPD dalam menjalankan wewenangnya. SDM dengan pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan analitis mumpuni akan melahirkan kebijakan dan pengawasan yang berpihak pada kesejahteraan warga (Firdaus et al., 2024). Hal ini secara langsung membentuk penilaian positif masyarakat atas kinerja lembaga.

H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kapasitas Individu terhadap Persepsi Masyarakat atas Kinerja Kelembagaan BPD di Desa Wanasari.

#### **Pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap Persepsi Masyarakat atas Kinerja Kelembagaan**

Sementara itu, bias persepsi publik sering dipicu oleh buruknya komunikasi. Komunikasi organisasi yang interaktif dan bersinergi akan mengeliminasi miskonsepsi warga, sehingga meningkatkan transparansi dan responsivitas lembaga (Sueldo, 2024).

H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Komunikasi Organisasi terhadap Persepsi Masyarakat atas Kinerja Kelembagaan BPD di Desa Wanasari.



**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori (*explanatory research*) guna menguji dan menjelaskan hubungan kausalitas (Setiadi, 2026), antara variabel independen, yaitu Kapasitas Individu (X1) dan Komunikasi Organisasi (X2), terhadap variabel dependen, yakni Persepsi Masyarakat atas Kinerja Kelembagaan (Y). Unit analisis dititikberatkan pada tingkat individu. Adapun populasi penelitian mencakup seluruh warga Desa Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, yang telah dewasa atau memiliki hak pilih, yang

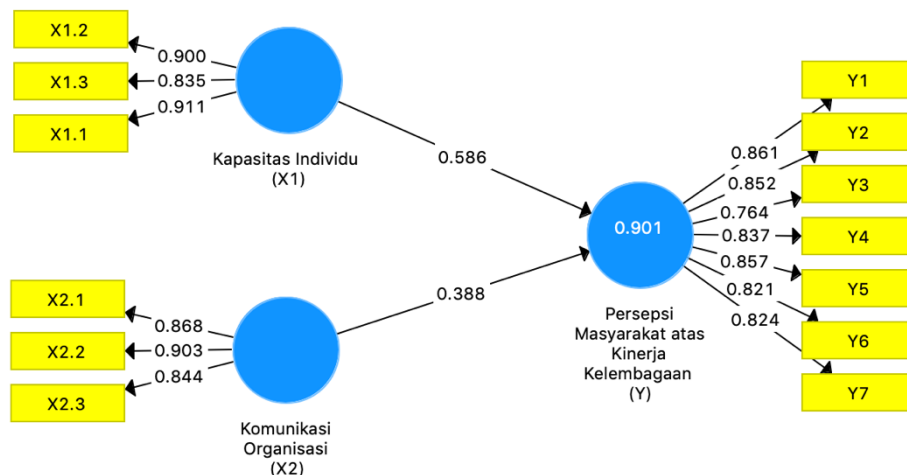
diasumsikan memiliki kapasitas kognitif untuk menilai tata kelola pemerintahan desa. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan kaidah Hair et al., yaitu 5 hingga 10 kali lipat dari jumlah indikator (Setiadi et al.,2025) dengan 13 indikator x 10, sehingga menghasilkan rentang sampel ideal sebanyak 130 responden. Teknik penarikan sampel *Purposive Sampling*, difokuskan pada warga yang pernah berinteraksi langsung dengan layanan pemerintah desa.

Pengumpulan data primer bertumpu pada penyebaran instrumen penelitian menggunakan kuesioner terstruktur yang dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel yang diteliti kuesioner tertutup yang diukur menggunakan Skala *Likert* 5 titik (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju). Sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama, kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan ketepatan dan konsistensi pengukuran. Data penelitian kemudian dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS) dengan bantuan SmartPLS (Mafriningsianti & Setiadi, 2026), karena metode ini mampu menguji hubungan simultan antarvariabel dan sesuai untuk ukuran sampel moderat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penelitian ini menerapkan metode *Structural Equation Modeling - Partial Least Squares* (SEM-PLS) karena fleksibilitasnya dalam menganalisis model kompleks dengan jumlah sampel moderat. Analisis terhadap 3 variabel laten dan 13 variabel manifes ini mencakup evaluasi model struktural maupun pengukuran. Validitas dikonfirmasi melalui *outer loading*  $\geq 0,70$  (toleransi  $\geq 0,60$ ) serta *AVE*  $\geq 0,50$ , sedangkan keandalan dibuktikan dengan *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*  $\geq 0,70$  (Mafriningsianti & Setiadi, 2025).



**Gambar 2. PLS Algoritma**

Sumber: diolah SMART PLS3 (2026)

Berdasarkan Gambar 1, seluruh indikator pada variabel Kapasitas Individu (X1), Komunikasi Organisasi (X2), dan Persepsi Masyarakat (Y) memiliki nilai loading factor di atas 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator sangat valid dan reliabel sebagai alat ukur. Selanjutnya, nilai R-square sebesar 0,901 menunjukkan bahwa model struktural ini tergolong sangat kuat. Artinya, 90,1% variasi Persepsi Masyarakat dipengaruhi oleh Kapasitas Individu dan Komunikasi Organisasi secara bersama-sama, sedangkan sisa 9,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

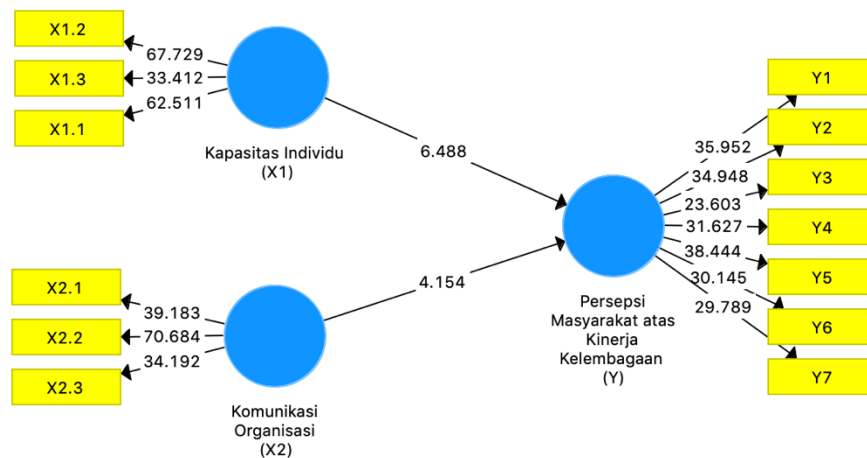
**Tabel 1. AVE dan CA, CR**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Kapasitas Individu ( X1)	0,779	0,858	0,913
Komunikasi Organisasi (X2)	0,760	0,842	0,905
Persepsi Masyarakat atas Kinerja Kelembagaan (Y)	0,691	0,925	0,940

Sumber: diolah SMART PLS3 (2026)

Berdasarkan Tabel 1, Hasil uji reliabilitas dan validitas menunjukkan model sangat akurat. Nilai AVE seluruh variabel melampaui 0,5, yang berarti validitas konvergen terpenuhi. Nilai Cronbach's Alpha (> 0,7) dan Composite Reliability (> 0,7) juga sangat tinggi, membuktikan instrumen penelitian konsisten dan reliabel. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa variabel Kapasitas Individu, Komunikasi Organisasi, dan Persepsi Masyarakat memiliki stabilitas pengukuran yang sangat baik untuk analisis lebih lanjut.

Evaluasi model struktural PLS menggunakan teknik bootstrapping untuk mengestimasi koefisien jalur guna menganalisis hubungan antarvariabel laten. Pendekatan ini menilai arah, besarnya pengaruh, dan signifikansi statistik secara sistematis (Prakoso & Setiadi, 2026). Hasilnya memberikan dasar inferensial yang kuat untuk menguji hipotesis serta memvalidasi hubungan kausal secara objektif dan empiris sesuai tujuan penelitian (Maulana et al.,2025).



**Gambar 3. Bootstrapping**  
Sumber: diolah SMART PLS3 (2026)

Berdasarkan Gambar 3, diagram jalur SEM yang menampilkan nilai statistik T untuk menguji signifikansi hipotesis. Pada model pengukuran, seluruh indikator secara meyakinkan terbukti valid dan signifikan dalam mengukur ketiga variabel laten karena nilainya jauh di atas batas angka 1,96. Selanjutnya pada model struktural, variabel Kapasitas Individu (6,488) maupun Komunikasi Organisasi (4,154) terbukti memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap Persepsi Masyarakat atas Kinerja sebuah institusi kelembagaan.

**Predictive Relevance**

Dalam metode PLS-SEM, nilai Q2 menjadi indikator validitas prediktif model terhadap data empiris. Model dinilai relevan jika  $Q^2 > 0$ . Secara spesifik, skor di atas 0,25 mencerminkan kemampuan prediksi moderat, sementara nilai melampaui 0,50 menandakan kekuatan prediksi yang sangat tinggi (Setiadi et al.,2025). Hal ini membuktikan bahwa model memiliki tingkat relevansi prediktif yang kuat dan akurat dalam menjelaskan variasi pada konstruk endogen yang diteliti.

**Tabel 2. Q-square**

Variabel	SSO	SSE	$Q^2 (=1 - SSE/SSO)$
Persepsi Masyarakat atas Kinerja Kelembagaan (Y)	910,000	350,212	0,615

Sumber: diolah SMART PLS3 (2026)

Berdasarkan tabel tersebut, variabel Persepsi Masyarakat atas Kinerja Kelembagaan (Y) memiliki nilai Q2 sebesar 0,615. Karena nilai ini lebih besar dari 0,50, model penelitian menunjukkan tingkat relevansi prediktif yang sangat kuat. Hal ini membuktikan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat akurat dalam memprediksi data empiris serta menjelaskan variasi pada konstruk endogen tersebut secara mendalam dan reliabel.

**Pengujian Hipotesis**

Penelitian ini menerapkan prosedur bootstrapping via SmartPLS untuk menguji hipotesis secara objektif. Metode ini dipilih karena fleksibilitasnya yang tidak mensyaratkan distribusi normal serta tetap stabil meskipun menggunakan sampel kecil. Melalui estimasi koefisien jalur, t-statistic, dan p-value, signifikansi hubungan antarvariabel dapat diukur secara akurat. Pendekatan ini memastikan pengujian model dilakukan berdasarkan data empiris yang kuat, sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian yang lebih reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Setiadi et al.,2025b).

**Tabel 3. Uji Signifikan Jalur (Path)**

Variabel	Original Sample (O)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values	Keterangan
Kapasitas Individu (X1) -> Persepsi Masyarakat atas Kinerja Kelembagaan (Y)	0,586	6,488	0,000	Berpepengaruh



Komunikasi Organisasi (X2) -> Persepsi Masyarakat atas Kinerja Kelembagaan (Y)	0,388	4,154	0,000	Berpengaruh
--	-------	-------	-------	-------------

Sumber: diolah SMART PLS3 (2026)

Berdasarkan tabel 3, Hasil uji menunjukkan bahwa kedua hipotesis diterima. Kapasitas Individu (X1) dan Komunikasi Organisasi (X2) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Masyarakat (Y). Hal ini divalidasi oleh nilai T-Statistik yang melampaui ambang batas 1,96 serta P-Value 0,000. Kapasitas Individu memberikan kontribusi pengaruh yang lebih besar (0,586) dibandingkan Komunikasi Organisasi (0,388) dalam membentuk persepsi kinerja kelembagaan.

### Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas individu dan komunikasi organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat atas kinerja kelembagaan BPD. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kualitas sumber daya manusia dan efektivitas sistem komunikasi merupakan determinan utama dalam membentuk legitimasi institusi publik di tingkat desa. Secara empiris, pengaruh kapasitas individu yang lebih dominan ( $\beta = 0,586$ ) mengindikasikan bahwa kemampuan personal anggota BPD seperti tingkat pendidikan, pengalaman organisasi, dan kemampuan analitis berperan krusial dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Firdaus et al. (2024) yang menegaskan bahwa kapasitas individu aparatur berkontribusi langsung terhadap kualitas kebijakan dan kepercayaan publik. Selain itu, Wahyuli et al. (2024) juga menemukan bahwa keterbatasan kapasitas SDM menjadi hambatan utama dalam efektivitas kelembagaan desa, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, secara teoretis dapat ditegaskan bahwa kapasitas individu merupakan bentuk human capital yang menentukan performa institusi publik.

Di sisi lain, komunikasi organisasi juga terbukti berpengaruh signifikan ( $\beta = 0,388$ ), meskipun kontribusinya lebih rendah dibandingkan kapasitas individu. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kompetensi individu penting, tanpa didukung komunikasi yang efektif, persepsi masyarakat tetap dapat terdistorsi. Hasil ini konsisten dengan Sueldo (2024) yang menyatakan bahwa komunikasi yang simetris dan partisipatif mampu meningkatkan transparansi dan pemahaman publik terhadap kebijakan. Selanjutnya, Svenbro & Wester (2022) menegaskan bahwa komunikasi yang baik dalam organisasi publik berperan dalam membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat, terutama dalam situasi krisis atau ketidakpastian.

Lebih jauh, hasil penelitian ini juga memperkuat perspektif tata kelola partisipatif yang dikemukakan oleh Nair & Abhirami (2024), bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada interaksi antara kapasitas aktor lokal dan kualitas komunikasi kelembagaan. Dalam konteks Desa Wanasari, keterbatasan kapasitas dan lemahnya komunikasi menyebabkan bias persepsi masyarakat terhadap fungsi BPD, yang cenderung dipahami secara sempit hanya sebagai lembaga pengawas. Secara kritis, peneliti berpendapat bahwa penguatan kapasitas individu harus menjadi prioritas utama melalui pelatihan berbasis kompetensi dan literasi kebijakan.



Namun, intervensi tersebut tidak akan optimal tanpa reformasi sistem komunikasi organisasi yang lebih terbuka, digital, dan partisipatif. Integrasi kedua aspek ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola desa yang berkelanjutan dan demokratis.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wanasari sangat dipengaruhi oleh kualitas kapasitas individu dan efektivitas komunikasi organisasi. Kapasitas individu menjadi faktor yang paling menentukan, karena kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman anggota BPD berperan langsung dalam menjalankan fungsi legislasi, penyerapan aspirasi, dan pengawasan. Semakin baik kapasitas yang dimiliki, maka semakin optimal pula kinerja yang ditampilkan, sehingga mampu membentuk penilaian positif dari masyarakat. Selain itu, komunikasi organisasi juga memiliki peran penting dalam membangun persepsi masyarakat. Komunikasi yang terbuka, interaktif, dan partisipatif mampu mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui komunikasi yang efektif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan BPD tidak hanya bergantung pada aspek struktural, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan pola interaksi yang dibangun dengan masyarakat. Kelemahan pada salah satu aspek tersebut dapat menimbulkan persepsi yang kurang tepat terhadap fungsi dan peran BPD. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara peningkatan kapasitas individu dan penguatan komunikasi organisasi sebagai strategi utama dalam memperbaiki kinerja kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa pelatihan, penguatan kompetensi, serta pengembangan sistem komunikasi yang lebih adaptif dan inklusif. Dengan demikian, BPD dapat berfungsi secara optimal sebagai representasi masyarakat dan pilar demokrasi desa yang mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

## **REFERENSI**

- Amin, Aidil, & Roza, Darmini. (2019). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA. *Unes Journal of Swara Justisia*, 1(1), 22-29. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v1i1.4>
- Briceno-Rosas, Roberto. (2025). Reliability of educational attainment of survey respondents: an overlooked barrier to comparability? *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-025-06051-9>
- Cidade, Daniela Firmino, & Oliveira, Mírian. (2023). The interaction between organizational communication and knowledge management: A systematic literature review. *Knowledge and Process Management*, 31(2), 157-168. <https://doi.org/10.1002/kpm.1770>



- Debala, Gemachis, Bhat, Mohd Abass, & Khan, Shagufta Tariq. (2023). Exploring the Nexus of inventory optimization and operational efficiency: Data-driven insights from public sector organizations in Ethiopia. *Cogent Business & Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2213966>
- Firdaus, Emilda, Artina, Dessy, Rauf, Muhammad A., Separen, Separen, & Wijaya, Tommy Tanu. (2024). Has Women's Participation in Local Government Been Strengthened? A Legal and Political Analysis in Riau Province? *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 155–186. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4540>
- Gaie, Christophe, Karpiuk, Mirosław, & Strizzolo, Nicola. (2025). Cybersecurity of Public Sector Institutions. *LAW & SOCIAL BONDS*, 53(6). <https://doi.org/10.36128/priw.vi53.1129>
- Jamal, Abd, Nasir, Muhammad, Syathi, Putri Bintusy, & Fitriyani, Fitriyani. (2023). Developing village in the former conflict region of Indonesia through social and economic inclusion: Evidence from Aceh. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2178521>
- Li, Yurui, Qin, Xiaofei, Sullivan, Abigail, Chi, Guangqing, Lu, Zhi, Pan, Wei, & Liu, Yansui. (2023). Collective action improves elite-driven governance in rural development within China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02089-9>
- Ma, Wenshuo, Wei, Fengqun, Yang, Leijie, & Ran, Xinyi. (2024). Research on the Measurement, Evaluation and Compensation of Traditional Village Residents' Emotional Perception: A Case of 14 Traditional Villages in Guanzhong Region. *Sustainability*, 16(6), 2546. <https://doi.org/10.3390/su16062546>
- Madjid, Udaya. (2024). Quality of Public Services: The Role of State Civil Apparatus in Realizing Good Governance. *Journal of Ecohumanism*, 3(7). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4590>
- Mafriningsianti, Evi, & Setiadi, Sandi. (2025). TRANSFORMATION OF SMES IN WEST JAVA: BUILDING NATIONAL ECONOMIC RESILIENCE THROUGH DIGITAL INNOVATION. *Branding: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(2 SE-Articles), 1–24. <https://doi.org/10.15575/jb.v4i2.51590>
- Mafriningsianti, Evi, & Setiadi, Sandi. (2026). OPTIMIZING COMMUNITY PARTICIPATION TO STRENGTHEN COLLABORATIVE GOVERNANCE IN ADDRESSING URBAN ISSUES IN BEKASI. 3(3).
- Maricut-Akbik, Adina. (2021). Q&A in legislative oversight: A framework for analysis. *European Journal of Political Research*, 60(3), 539–559. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12411>
- Maulana, Rizky, Alhidayatullah, & Setiadi, Sandi. (2025). Digital Adaptation Strategies for MSMEs in the Vuca Era: A Study of SMEs in Sukabumi City. *International Journal of Science and Society*, 7(3 SE-Articles). <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v7i3.1521>
- Nair, Manju S., & Abhirami, A. (2024). Localizing sustainable development goals (SDGs) through decentralized governance: Insights from Kerala, India. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(16), 10339. <https://doi.org/10.24294/jipd10339>



- Nelly Sari, Ria, Junita, Dewi, Anugerah, Rita, Tri Nanda, Satria, & Zenita, Raisya. (2022). Effect of governance practices on value co-creation and organizational performance: Evidence from village-owned enterprises in Riau, Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 20(4), 532-543. [https://doi.org/10.21511/ppm.20\(4\).2022.40](https://doi.org/10.21511/ppm.20(4).2022.40)
- Prakoso, Sugih, & Setiadi, Sandi. (2026). *DATA-DRIVEN STRATEGY : HOW BIG DATA SAVES TOURIST DESTINATIONS FROM ENVIRONMENTAL DEGRADATION*. 2(2), 404-415.
- Razak, Muhammad Rais Rahmat, B, Sofyan, Sofyan, Wahyudi, Lubis, Sandi, & Rais, Tazkia Rhamdhiny. (2024). Development of integrated village fund governance model with siberas public service application. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(5), 2184-2198. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i5.1969>
- Ruan, Ji, & Wang, Peng. (2022). Elite Capture and Corruption: The Influence of Elite Collusion on Village Elections and Rural Land Development in China. *The China Quarterly*, 253, 107-122. <https://doi.org/10.1017/s0305741022001217>
- Setiadi, Sandi. (2026). *Enhancing Customer Loyalty : The Mediating Effect of Experience on Usability , Security , and Content Quality with Digital Literacy Moderation*. 14(1), 1513-1526. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v14i1.4909>
- Setiadi, Sandi, Alhidayatullah, Alhidayatullah, & Maulana, Rizky. (2025a). Towards the Sustainability of Food MSMEs through Strengthened Collaboration and Competitiveness. *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)*, 3(4 SE-Articles), 331-345. <https://doi.org/10.47353/ijema.v3i4.341>
- Setiadi, Sandi, Alhidayatullah, & Maulana, Rizky. (2025b). *Kolaborasi Strategi UMKM : Membangun Daya Saing dan Keberlanjutan di Era Disrupsi*.
- Setiadi, Sandi, Maulana, Rizky, & Hidayat, Sarip. (2025). Dampak Pungutan Desa terhadap Aset dan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 6(2), 160-180. <https://doi.org/10.37150/jimat.v6i2.3732>
- Setiadi, Sandi, Widyastuti, Sri, Zulkifli, & Darmansyah. (2025). Sustainable nature tourism transformation: The strategic role of green tourism in West Java. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(3), 1544-1569. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5599>
- Sueldo, Mariana. (2024). (How) do universities listen? Evidence from institutional websites of the world's top universities. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-21. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-576>
- Svenbro, Maja, & Wester, Misse. (2022). Examining Legitimacy in Government Agencies' Crisis Communication. *International Journal of Strategic Communication*, 17(1), 54-73. <https://doi.org/10.1080/1553118x.2022.2127358>
- Syam, Fauzi, Helmi, Helmi, Nuriyatman, Eko, Rahardja, Ivan Fauzani, & Saputra, Benny. (2024). Why Should the Role of the House of Representatives in Monitoring and Review Local Regulations Be Strengthened? *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 417-456. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4578>
- Vorbach, Daniel, & Ensor, Jonathan. (2022). Autonomous Change Processes in Traditional Institutions: Lessons from Innovations in Village Governance in Vanuatu. *International*



*Journal of the Commons*, 16(1), 173–188. <https://doi.org/10.5334/ijc.1170>

Wahyuli, Ririn Anugrah, Haning, Muh Thahir, & Lambali, Suryadi. (2024). Capacity Building Challenges in Human Resource Development in Village Community Empowerment Organizations. *International Journal of Religion*, 5(11), 5721–5729. <https://doi.org/10.61707/eyn9c979>

Widiarto, Aan Eko, Hassan, Muhamad Sayuti, Rusli, Mohd Hazmi Mohd, & Setiawan, Endrianto Bayu. (2025). The authority relationship of Central and Local Governments in forming laws and regulations: between Indonesia and Malaysia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1), 148–167. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.36629>